

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan Nasional membutuhkan dana, yang salah satunya bersumber dari tabungan nasional. Tabungan merupakan indikator yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di dalam perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi di Indonesia cukup tinggi karena Indonesia termasuk Negara yang sedang berkembang (*developing countries*) sehingga membutuhkan dana yang besar. Namun usaha pengalihan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa keluar negeri ataupun penerimaan melalui instrumen pajak.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para

nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank, harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan (UU nomor 24 tahun 2004).

Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 ini menetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara atau resiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.

Presiden telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan karena krisis keuangan secara global berakibat pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan telah menunjukkan kegentingan yang memaksa.

Undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpananan.

Dengan undang-undang yang baru ini, masyarakat akan lebih percaya terhadap perbankan. Ini berarti tabungan nasional akan semakin meningkat. Krisis global telah menimbulkan dampak yang besar pada sektor perekonomian di Indonesia. Hal ini membawa dampak yang besar pada tabungan nasional karena pendapatan pemerintah dan masyarakat akan menurun, sehingga tabungan akan ikut mengalami dampak yang cukup besar. Sehingga sektor perbankan juga merasakan dampak yang luar biasa dalam hal likuiditas. Bank Century merupakan salah satu bank yang telah menjadi korban di sektor perbankan akibat krisis global.

Tabungan nasional ini sangat penting, hal ini dibuktikan dengan adanya jurang tabungan dan investasi (*saving-investment gap*) yang semakin melebar dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa pertumbuhan investasi domestik melebihi kemampuan dalam mengakumulasi tabungan nasional. Secara umum usaha pengalihan modal dari masyarakat dapat berupa pengalihan modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengalihan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari tabungan sukarela, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Oleh sebab itu pembiayaan Pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, sumber dananya berasal dari tabungan nasional dan pinjaman luar negeri. Dimana Indonesia pada masa orde baru pembangunannya bergantung dari pinjaman luar negeri. Dan perlahan tapi pasti Indonesia berusaha untuk mandiri agar tidak bergantung pada pinjaman luar negeri (Wahid Saputra 2008).

Untuk menggerakkan perekonomian adalah konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah merupakan pilihan lain yang masih mungkin.

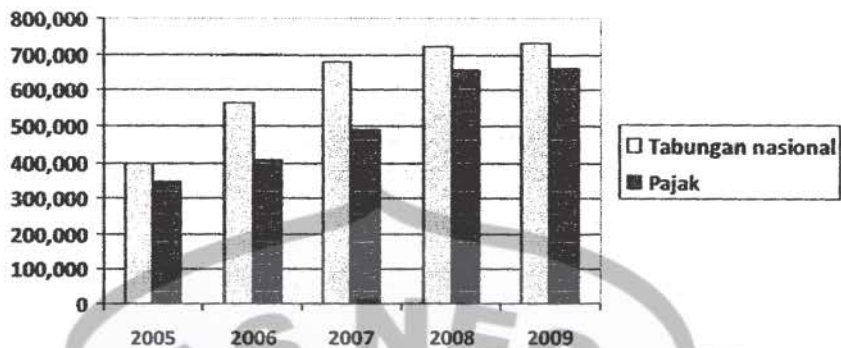
Pengeluaran pemerintah diharapkan mampu dalam dua hal, yang pertama melalui pengeluaran untuk program pemerintah yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat melalui pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Pengeluaran pemerintah ini diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga diharapkan dapat meredam dampak krisis global yang melanda perekonomian Indonesia.

Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan fungsi dari tabungan yang tersedia atau pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah tabungan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat suatu negara yang tersedia untuk pembangunan.

Tabel 1.1 : Hubungan Tabungan Nasional Indonesia, Penerimaan Pajak dan Suku Bunga Periode 2005 sampai dengan 2009

Tahun	Tabungan Nasional (M)	Suku Bunga (%)	Pajak (M)
2005	399.496	4,32	347.031,1
2006	562.970	4,75	409.203
2007	680.170	3,48	490.989
2008	721.829	3,33	658.701
2009	732.057	3,00	661.759

Sumber : Statistik Keuangan Indonesia, Bank Indonesia



Gambar 1.1 Hubungan Tabungan nasional dengan Pajak.

Perkembangan tabungan nasional, penerimaan pajak dan suku bunga digambarkan pada tabel dan gambar diatas. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan tabungan nasional meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Sedangkan suku bunga berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi ada kecenderungan menurun seiring dengan keadaan ekonomi Indonesia yang semakin membaik. Suku bunga merupakan faktor utama dalam mempengaruhi tabungan, semakin meningkat suku bunga maka semakin meningkat tabungan atau sebaliknya.

Tabungan pemerintah salahsatunya berasal dari penerimaan dari sektor pajak. Pajak pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 penerimaan pajak 347.031,1 Miliar menjadi 425.053,1 Miliar di tahun 2006. Tahun 2009 penerimaan pajak menjadi 661.759 Miliar dan meningkat di tahun 2010 sebesar 743,326 M, hal ini dapat terlihat pada tabel 1.1 diatas.

PDB juga mempunyai pengaruh positif terhadap tabungan nasional. Peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan tabungan, karena semakin meningkat pendapatan semakin menurun MPC dan akan meningkatkan MPS.

Tabel 1.2 : Tabungan Nasional Indonesia dan pertumbuhan ekonomi

Tahun	Tabungan Nasional (M)	Pertumbuhan ekonomi (%)
2005	399.496	5,7
2006	562.970	5,5
2007	680.170	6,3
2008	721.829	5,2
2009	732.057	5,4

Sumber : Statistik Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Menurut Modigliani, 1986 (*Life Cycle Hypothesis*), Umur atau usia masyarakat mempengaruhi pola perilaku konsumsinya. Dissaving bisa ditutup oleh saving tahun sebelumnya. Pada usia muda orang akan meningkatkan tabungannya dan dimasa tua ia akan membelanjakannya (*dissaving*), sehingga makin panjang usianya maka ia akan meningkatkan pendapatan yang kemudian ditabung. Perkembangan ini dapat dilihat pada data usia harapan hidup dari tahun ketahun mengalami signifikan yang dapat dilihat pada table 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3. Perkembangan tabungan nasional dan usia harapan hidup.

Tahun	Tabungan nasional (M)	Usia Harapan Hidup (tahun)
2005	399.496	69,7
2006	562.970	70,1
2007	680.170	70,5
2008	721.829	70,7
2009	732.057	70,9

Sumber : Statistik keuangan Indonesia, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Tabungan Nasional dipengaruhi oleh suku bunga, Pajak, usia harapan hidup dan PDB. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Nasional Di Indonesia**". Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi tabungan nasional di Indonesia sehingga ke

depan Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di dalam melaksanakan pembangunannya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga, pajak, usia harapan hidup , PDB terhadap tabungan nasional ?
2. Berapa besar elastisitas tingkat suku, pajak, usia harapan hidup, PDB terhadap tabungan nasional ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat suku bunga, pajak, usia harapan hidup dan PDB terhadap tabungan nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui elastisitas tingkat suku bunga, pajak, usia harapan hidup dan PDB terhadap tabungan nasional Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya sebagai pengambil keputusan untuk dapat membuat kebijakan yang tepat dalam perekonomian.

2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis tentang kondisi tabungan nasional di Indonesia khususnya dan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini secara lebih luas dan mendalam.

